

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang disingkat dengan UMKM merupakan salah satu isu yang sampai saat ini masih menjadi topik hangat di dalam perekonomian Indonesia dan sedang gencar digalakkan dan diupayakan oleh pemerintah untuk perkembangannya. Bagaimana tidak, UMKM adalah salah satu penopang ekonomi bangsa dikarenakan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Disamping itu, UMKM juga merupakan jenis usaha yang mandiri karena mampu mengelola operasional usahanya sendiri. Hal tersebut tentunya memberikan dampak positif pada sisi ketahanan terhadap krisis, jika UMKM mampu mengelola kegiatan operasional usahanya secara mandiri maka tidak akan memperoleh dampak yang signifikan apabila terjadi krisis global dikarenakan tidak adanya keterlibatan yang besar dengan hutang dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya (Warsano *et al*, 2010). Tentu tidak mudah bagi UMKM untuk dapat bertahan meskipun dalam keadaan krisis karena ada beberapa penyebab yang mempengaruhi ketahanan UMKM itu sendiri, salah satunya yaitu dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Disini, UMKM dituntut untuk mampu bersaing tidak hanya dengan pesaing lokal tetapi juga internasional.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi UMKM di Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan UMKM mendapatkan perlindungan keadilan usaha dan mampu meningkatkan perannya dalam meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Selain itu UMKM juga perlu mendapatkan perhatian lebih terkait dengan bagaimana agar UMKM mampu berkembang dan memperluas usahanya. Di Indonesia, masalah yang kebanyakan dialami oleh pelaku UMKM antara lain sulitnya mendapatkan modal untuk perluasan usaha mereka. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu cara dalam menjawab kesulitan yang dialami oleh pelaku UMKM. Dengan adanya pencatatan usaha secara lengkap dan teratur tentu akan memudahkan bagi pelaku UMKM untuk menilai sejauh apa usaha yang mereka geluti selama ini. Laporan keuangan juga mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan kinerja usahanya, bagaimana sebuah usaha memanfaatkan asset yang dimiliki untuk mengelola usahanya secara efektif dan efisien.

Mengatasi masalah diatas, sebelumnya telah ada standar akuntansi untuk UMKM guna membantu dalam menyusun laporan keuangan yang dikenal dengan SAK ETAP. SAK ETAP merupakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, yang dimaksudkan adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, dan entitas yang mengeluarkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK ETAP disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan

Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 dan mulai efektif diberlakukan pada 1 Januari 2011 (Hetika dan Nurul, 2017). Namun ternyata kendala pada pelaku UMKM mengaku bahwa mereka merasa kesulitan untuk membuat laporan keuangan karena dianggap rumit. Melihat betapa krusialnya akuntansi atau pencatatan untuk sebuah usaha, berbagai upaya terus dilakukan untuk bisa tetap mengembangkan dan mendorong UMKM untuk terus tumbuh sehingga mampu menyokong perekonomian bangsa.

Penelitian ini menindaklanjuti dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Cahyati *et al* (2011) dan Rahmawati dan Oktaviani (2016). Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis kesiapan UMKM dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah standar akuntansi yang digunakan yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah dan cakupan objeknya.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dikeluarkannya standar baru oleh IAI sebuah standar khusus untuk UMKM dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan relevan yaitu SAK EMKM. SAK EMKM mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2018. SAK EMKM sendiri merupakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah yang ditujukan untuk entitas yang belum memenuhi persyaratan akuntansi yang telah diatur dalam SAK ETAP. SAK EMKM merupakan standar yang sederhana dan lebih mudah pemahamannya bagi pelaku UMKM

karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan usahanya sehingga mereka mampu mengetahui keadaan sebenarnya dari usaha yang mereka geluti. Dengan terbitnya SAK EMKM ini diharapkan mampu mendorong UMKM dalam memperlebar akses permodalan atau pembiayaan dari industri perbankan dan menjadi dasar atas penyusunan dan mengembangkan pedoman akuntansi bagi UMKM di Indonesia (www.iaiglobal.or.id).

Penelitian ini dilakukan pada empat UMKM unggulan di Kecamatan Mojoagung. Kecamatan Mojoagung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang yang memiliki potensi berkembangnya UMKM. Hal ini dapat diketahui dari adanya beberapa UMKM unggulan kabupaten Jombang yang berada di Kecamatan Mojoagung (Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang). Dalam jombangkab.go.id dijelaskan bahwa salah satu potensi di kecamatan mojoagung adalah industri cor kuningan yang sudah turun temurun dan bahkan bertahan hingga generasi kelima yang ada di Desa Mojotrisno. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana kesiapan UMKM dalam penerapan SAK EMKM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa salah satu upaya untuk mengembangkan UMKM adalah dengan diterapkannya SAK EMKM untuk penyusunan laporan keuangan pada UMKM. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesiapan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penerapan SAK EMKM?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memberikan batasan masalah pada cakupan objek penelitian yaitu bahwa penelitian ini dilakukan pada empat UMKM unggulan di Kecamatan Mojoagung berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penerapan SAK EMKM.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Jombang khususnya Kecamatan Mojoagung agar dalam penyusunan laporan keuangan usahanya mengacu pada SAK EMKM.

2. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penelitian-penelitian yang memiliki kaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM kepada para pelaku UMKM di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.